



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

Q.S. At-Taubah, 9:29

Abdurahmat. 2008. *Pengertian Efektivitas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Adrian, Sutedi. 2011, *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

B. Ilyas, Wirawan, dan Richard Burton. 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, 2017, *Data Perekaman SPT*. Pekanbaru

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan, Teori dan Kasus. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama

Siagian, Sondang., P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara.

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-132/PMK.06/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.